

Drs. H. A SOMAD ZAWAWI

TATA PEMERINTAHAN INDONESIA

Dalam Wawasan Nusantara Menghadapi Globalisasi Dunia

1. Pendahuluan

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membimbing dan menerangi pejalan perjuangan bangsa Indonesia, sejak perjuangan mencapai kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan dalam rangka mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasionalnya. Lebih mengembirakan kita bahwa dalam pokok-pokok materi GBHN tahun 1993, tentang asas pembangunan nasional; diawali oleh bahwa *segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakan dan dikendalikan oleh Keimanan dan Ketaawaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa* sebagai nilai luhur yang menjadi landasan Spiritual, Moral dan etik serta Corak bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. (Bahan Penataran P4 oleh BP-7 Pusat 1993).

Dan sebelum itu dalam Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah memberikan arah yang jelas kemana bangsa Indonesia akan dibawa kemana yaitu dalam pasal 4 yang berbunyi: "Pendidikan Nasional bertujuan

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan."

Semua yang dikemukakan di atas sudah menjadi kesepakatan nasional dan menjadi kebijaksanaan nasional dan semua warga harus mendukung dan melaksanakannya secara konsekuen dan konsisten dalam negara Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang besar dan berwibawa di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia mempunyai alasan yang amat kuat, ditambah lagi letak Geografis Indonesia berada pada posisi silang dunia dengan didukung oleh potensi alam yang tinggi dalam berbagai aspek, dan permasalahannya sekarang tergantung pada mutu manusia yang akan mengelolanya, yaitu antara lain kemampuan ilmu pengetahuan dan

tehnologi sebagai faktor dominan pembangunan menuju negara industri yang besar.

2. Tata Pemerintahan Republik Indonesia

Setelah pada pendahuluan mengutarakan dasar kekuatan spiritual, moral dan etika yang melandasi pembangunan bangsa, kebanyakan kita hanya memfokuskan pada tata pemerintahan dalam arti yang sempit, yaitu menajam untuk menyoroti bentuk-bentuk kelembagaan dari lembaga tertinggi, lembaga tinggi atau dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah baik yang menyangkut suprastruktur maupun infrastruktur politik. Perangkat-perangkat pemerintahan dalam suatu tata pemerintahan dalam suatu negara adalah suatu hal yang mesti ada dalam perangkat lunak dalam negara, akan tetapi perangkat-perangkat tersebut adalah alat saja, yang lebih penting lagi ialah nilai-nilai yang memberikan jiwa yang menyemangatnya serta perkembangan masyarakat yang mendukungnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka tata pemerintahan harus diartikan secara luas, yaitu tata pemerintahan sebagai suatu Sistem Pemerintahan yang berkaitan dengan segala aspek yang berkaitan seperti segi-segi sosial budayanya, asas-asas pemerintahan, nilai-nilai yang memberikan jiwa dan menyemangatnya, arah kemana bangsa akan dibawa, fungsi pemerintahan itu sebagaimana seharusnya masyarakat pendahulunya dan

tujuan mengapa kita harus membangun dan lain-lain sebagainya, dengan demikian Tata Pemerintahan harus diartikan kelembagaan itu adalah sebagai wadah yang mesti ada dan apa yang seharusnya menjadi isi yang memberikan jiwa dan semangat kelembagaan tersebut. Apa yang dimaksud dengan pernyataan di atas secara teoritis sebenarnya sudah ada sebagai hasil aspirasi perjuangan bangsa, namun dalam praktek kehidupan sehari-hari masih banyak belum memahaminya, karena itu dalam tulisan ini masih perlu terus diutarakan antara lain sebagai berikut:

a. Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kebangsaan, artinya Negara Indonesia didirikan sama sekali bukan karena alasan persamaan suku, ras, golongan, asal-usul atau persamaana agama, tetapi Bangsa Indonesia didirikan oleh suatu dorongan untuk hidup bersama, bersatu dalam suatu bangsa untuk membangun suatu bangsa yang besar dan berwibawa, yaitu Bangsa Indonesia yang Jaya. Oleh sebab itu Keanekaan yang ada di bumi Indonesia adalah suatu kekayaan bangsa dan kebhinekaan tersebut harus menjadi modal pembangunan yang harus memberikan manfaat untuk kehidupan warga negaranya.

b. Negara Indonesia adalah negara yang bersifat *integralistik*, sifat ini sudah lebih dahulu dikemukakan oleh Prof. DR. Supomo dalam BPUPKI sebelum Indonesia merdeka. Yang harus menjadi sifat masyarakat Indonesia

yang merdeka. Beliau lebih menekankan bahwa masyarakat yang merdeka itu tidak mengenal istilah masyarakat mayoritas dan minoritas. Negara bersatu dengan seluruh rakyatnya mengatasi seluruh golongan dalam lapangan apapun; hal ini juga berarti Negara tidak menyatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat baik itu golongan politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankamnas tetapi menyatukan diri dalam segala lapisan. Namun demikian tidak pula mencampurbaurkan semua aspek yang ada misalnya berbicara kerukunan beragama, tidak berarti mencampurbaurkan antara agama-agama yang ada, semua agama tetap berada pada prinsip-prinsip agama yang diyakininya misalnya masalah aqidah dan ibadah masing-masing, *yang dirukunkan adalah sikap orang-orang penganut agama dalam berbangsa dan bernegara yang harus saling menghormati satu sama lainnya.* Karena itu dalam negara Pancasila setiap agama dilindungi/dibolehkan membina dan mengembangkan setiap agama yang ia yakini dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing.

Setiap warga negara Indonesia harus menyadari suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia ditakdirkan oleh Allah swt bersifat kebhinekaan dalam berbagai aspek, atas dasar itupula Indonesia menjadi negara kesatuan dimana wilayah negara dibagi atas daerah tingkat I, tingkat II dan tingkat III yang didalamnya tidak terdapat negara bagian.

Atas kesadaran itu pula bahwa kemerdekaan yang telah kita capai adalah usaha bangsa yang diberkati oleh Allah dan hal ini benar-benar tercermin dalam muqadimah UUD 45 alinea ketiga berbunyi:

"Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".

Dipandang dari macam dan sifat masyarakat yang mendukung serta aneka kebudayaan dan permasalahan yang mengiringinya, disadari pula betapa majemuk dan kompleks permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Namun demikian kemajemukan itu tidak boleh menjadi bencana seperti perpecahan dan lain-lain, karena pada kemajemukan itu didapatkan titik-titik temu yang menyatukannya antara lain sebagai hamba Allah swt. sadar dengan suatu kenyataan dan diakui kebhinekaan yang disatukan dalam ketunggalikaan dalam suatu bangsa dan negara yang harus dilihat sebagai suatu kekayaan bangsa bukan suatu perbedaan yang dapat menjadi penyebab bencana nasional. Dari sudut kedaulatan, negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat artinya kedaulatan ada di tangan rakyat, dan sepenuhnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sistem pemerintahan diselenggarakan oleh Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku

(Pancasila + UUD 45 dstnya). Atas dasar di atas maka demokrasi kita didasarkan paham yang dianut yaitu "Demokrasi Pancasila".

Demokrasi Pancasila ialah demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang telah juga dijabarkan dalam UUD 45, seterusnya GBHN, UU dan seterusnya. Yang mana arah dan tujuan kemana bangsa dan negara yang akan dibawa, sudah tertera secara jelas yang antara lain diperinci oleh tujuan Pendidikan Nasional yaitu tujuan pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dari sudut struktur pemerintahan kita lihat ada struktur politik dan infrastruktur sejarah telah secara jelas mencatat supratruktur dan infrastruktur politik di Indonesia yaitu kita telah mengalami zaman *demokrasi liberal* dengan multi partai dan multi ideologi, akibatnya terjadi instabilitas politik akibat kompleks ideologi berkepanjangan terutama saat konstituante jadi ajang pertentangan dan berarti bubarnya konstituante. Kemudian mengalami pula *demokrasi terpimpin* berakibat pula penyelewengan dan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 45 yang

dimulai 1959 dan berakhir G30S PKI 1965. Kemudian sudah itu lahir Orde Baru yang bertekad secara konsekuen melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni, karena peristiwa berakhirnya G30S PKI kita jadikan titik tolak untuk mengembalikan kehidupan politik ke jalan yang benar, dengan mengembalikan kepada fungsi/keudukan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 45.

Dalam kehidupan infrastruktur politik juga dilakukan pembenahan-pembenahan dan penataan. Dalam pembenahan dan penataan tersebut yang penting bukan penyederhanaan kepartaian, tetapi yang sangat penting/esensi adalah perubahan pola pikir partai. Semua partai/golongan punya asas yang sama yaitu asas tunggal Pancasila, sehingga partai-partai dan golongan karya serta organisasi kemasyarakatan wajib selaras dengan nilai-nilai luhur dan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila, dan sama-sama berkewajiban membangun bangsa, dengan silahkan berbeda dan saling mengungguli dalam program untuk membangun bangsa, dan masing-masing mampu menjadikan dirinya sebagai kekuatan-kekuatan pembangunan bangsa.

3. Kepribadian Wawasan Nusantara

Sebagaimana kita maklumi bahwa pengertian Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Indonesia ialah cara pandang bangsa Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yang serba nusantara.

Dari pengertian di atas berarti bangsa Indonesia telah memiliki suatu wawasan bahwa untuk mencapai tujuan nasional, kita harus melihat atau memandang kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan secara utuh, baik segi kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan wilayah yang utuh maupun kesatuan pertahanan dan keamanan. Ini juga berarti wawasan yang diartikan sebagai cara pandang/cara melihat tidak sama dengan cakrawala/pandangan dalam arti sehari-hari.

Akan tetapi wawasan dimaksud sebagai cara pandang terhadap sesuatu juga bermakna kebijakan atau kearifan, policy atau beleid yang didasarkan banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang amat penting yang mempengaruhinya adalah cita-cita bangsa dan prinsip-prinsip kenegaraan yang hakekatnya telah tercantum pada Pancasila dan UUD 1945. Jadi tegasnya wawasan itu bersifat konsepsional. Strategi yang mengandung makna kebijakan. Semua makna tersebut kita tujuikan kepada makna *Wawasan Nusantara Sebagai Konsep Kenegaraan*. Selanjutnya jika berbicara Wawasan Nusantara sebagai konsep ke-

negaraan bangsa Indonesia, maka berarti pula bahwa konsep Wawasan Nusantara sebagai suatu pengakuan atau membenaran bahwa konsep tersebut hasil dari aspirasi perjuangan bangsa Indonesia. Sejak zaman Sriwijaya, Majapahit masa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan masa mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang, dimana hal-hal positif kita angkat dan kita lestarikan sedangkan yang negatif/merugikan kita buang jauh-jauh.

4. Globalisasi Dunia Bagi Indonesia

Bangsa Indonesia yang telah membangun, sama diakui bahwa pembangunan kita berhasil namun diakui pula dalam banyak hal masih terjadi kebocoran disana-sini terutama dalam pelaksanaan pemakaian anggaran belanja pembangunan. Keberhasilan pembangunan tersebut dan begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah menempatkan bangsa Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan globalisasi dunia. Keadaan yang demikian akan membawa konsekuensi bahwa perkembangan dunia internasional itu akan mempengaruhi perkembangan situasi di dalam negeri Indonesia. Di suatu pihak dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan masyarakat bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, sedangkan di pihak lain tidak

menutup kemungkinan akan mendorong lahirnya iklim yang membuat perubahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara bahkan dapat juga bertentangan dengan moral bangsa Indonesia sendiri. Contoh jelas pengaruh komunis internasional ingin memberi corak baru ideologi negara Pancasila untuk menjadi negara Indonesia berdasarkan ideologi komunis yang sangat bertentangan dengan ideologi negara Pancasila.

Untuk semua itu, kita harus yakin bahwa orde baru yang sekarang kita berada di dalamnya berada pada posisi yang benar, dimana kita ingin kembali kepada kemurnian ajaran Pancasila dan UUD 45, walaupun kita sadar masih juga banyak hal-hal perlu dibenahi dan semua itu kita jalankan dengan baik. Pembangunan di segala aspek kehidupan yang dilakukan secara bertahap harus diupayakan sejalan dengan perkembangan masyarakat dan zaman.

Disamping itu ada lagi yang perlu dipahami oleh setiap warga negara yang disamping kesadaran berbangsa dan negara juga suatu keyakinan bahwa bangsa Indonesia yang sedang membangun lebih memberi kemungkinan untuk kita mencapai cita-cita bangsa menjadi bangsa yang besar dan berwibawa di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia dengan alasan secara geografis Indonesia berada di posisi silang antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (samudra Atlantik dan samudra Hindia/Indonesia) dan bertepatan pada garis katulistiwa. Po-

sisi ini benar adalah karunia Allah swt. yang sangat besar, bahkan menciptakan situasi potensi alam yang melimpah ruah dan semua itu tidak diketemukan pada bangsa lain, baik yang pada saat ini tergolong bangsa maju (seperti Jepang) maupun negara yang tergolong sedang berkembang. Oleh sebab itulah asumsi penulis bahwa Indonesia lebih mungkin menjadi negara maju, bahkan akan lebih maju dari negara-negara yang sekarang sudah tergolong maju.

Semua bangsa di dunia sekarang sedang mendambakan menjadi negara industri sesuai dengan kemampuan yang ada pada negaranya masing-masing untuk menjadi negara industri. Ilustrasi kami setidaknya tidaknya harus memiliki tiga (3) syarat yaitu (a) kemampuan manajerial, (b) mekanisme permodalan yang mampu menunjang (c) adanya kemampuan lptek yang cukup tangguh. Dari ketiga syarat di atas lptek lah menjadi syarat dominan. Negara Indonesia yang pertanyaan sejarah mana posisi Indonesia dalam hal lptek pada globalisasi dunia sekarang ini ada beberapa alternatif yang dihadapkan pada bangsa Indonesia yaitu apakah Indonesia lebih banyak sebagai konsumen atau menjadi unggul sebagai produsen lptek. Kita menyadari memang tidak ada negara yang benar-benar mandiri dalam arti mandiri sepenuhnya tanpa ketergantungan kepada negara lain.

Namun Indonesia harus menempatkan diri pada posisi *keseimbangan*

yang strategis yaitu pada suatu pihak kita berperan sebagai konsumen tapi pada pihak lain harus mampu berperan sebagai produsen lptek, dan kesemuanya itu sesuai dengan tuntutan dan tahapan pembangunan. Jika tidak betapa pun kita membangun, kita akan sangat tergantung pada potensi lptek asing dan kondisi begitu akan terjadi strategi yang lemah pada ketahanan nasional, sebab kemandirian akan berjalan sejajar dengan ketahanan nasional, tetapi berbanding terbalik dengan ketergantungan sebaliknya semakin rendah kemandirian akan semakin tinggi ketergantungan ini berarti sekaligus makin rendah ketahanan nasional, hal ini tentu tidak kita kehendaki.

5. Pilihan-pilihan Politik di Masa Depan

Situasi pada masa pembangunan jangka panjang kedua akan tetap dipengaruhi oleh berbagai kecenderungan yang kini semakin dirasakan, misalnya saja adanya perdagangan bebas. Dari segala kecenderungan tersebut persoalannya *"Bagaimana bangsa Indonesia melakukan penyesuaian-penyesuaian agar kita dapat terus hidup dengan tegar untuk meneruskan pembangunan dan tetap maju dalam perubahan dinamika yang terjadi di dunia pada umumnya."* Pembangunan jangka panjang ke dua harus tetap merupakan kesinambungan, perkembangan dan peningkatan Pembangunan Jangka Panjang pertama. Tekad pembangunan

juga membawa konsekwensi mengingat keadaan dalam negeri dengan segala potensi yang kita miliki sebagai hal yang positif berhadapan pula dengan kekurangan-kekurangan yang ada sebagai hal yang negatif dihadapkan pula pada kecenderungan-kecenderungan dunia sekarang dan masa depan; membuat kita bangsa Indonesia melakukan tindakan persiapan berupa kebijaksanaan mengadakan pilihan-pilihan kebijakan yang bersifat *"keseimbangan yang strategis"* guna mempertahankan momentum pembangunan yang sekarang tetap jalan. Pilihan-pilihan dimaksud antara lain adalah:

a. Bahwa tujuan dan arah pembangunan prinsipnya tidak berubah antara landasan ideal Pancasila dan landasan konstruksional berupa UUD '45 tetapi diusahakan untuk secara konsekwen dan konsisten semakin dimurnikan dari penyelewengan-penyelewengan yang sebelumnya pernah terjadi baik pada masa demokrasi liberal maupun demokrasi terpimpin.

b. Yang menjadi subyek dan obyek pembangunan juga tidak berubah, asas tunggal Pancasila sudah jadi kesepakatan nasional, karena itu pelaksanaan pembangunan sekarang yang akan datang juga akan merupakan pengamalan Pancasila. Oleh sebab itu hakekat pembangunan nasional tetap dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, hal ini berarti bahwa pembangunan nasional sekarang dan yang akan datang

tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah saja atau kepuasan bathin saja, tetapi *keselarasan, keserasian, dan keseimbangan* antara yang bersifat fisik-material dengan yang bersifat mental-spiritual, terutama agama (atau keduanya lahir-bathin).

c. Pilihan lain untuk mencapai *identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia* harus dipertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dengan menutup segala peluang yang mendorong untuk terjadinya kesalahan, atau tindakan-tindakan/ tuntutan-tuntutan yang tidak sesuai dengan konsensus nasional karena dari pengalaman yang pernah kita alami seperti zaman Sriwidaya, zaman Majapahit, kerajaan Demak di Jawa. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, masa mempertahankan kemerdekaan dan sampai sekarang mengenal kemerdekaan selalu terlihat secara nyata bahwa perpecahan akan berakibat keruntuhan.

d. Mempertahankan demokrasi Pancasila, yang semakin tumbuh dengan sehat, dimana demokrasi Pancasila harus semakin ditunjukkan/ dipertajam, ditujukan kepada hakekat kedaulatan rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Namun demikian kebebasan dalam demokrasi Pancasila jangan diartikan sebagai kebebasan yang tanpa batas, tetapi kebebasan yang bermoral dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa. Ingat, demokrasi liberal yang bebas berakibat konstituante menjadi ajang pertengkaran yang tidak

menghasilkan apa-apa. Akhirnya konstituante yang dibiayai rakyat dibubarkan. Demikian juga demokrasi terpimpin, yang akhirnya penyimpangan/ penyelewengan dan diakhiri bencana nasional G-30-S/PKI yang lalu.

e. Sikap keterbukaan bangsa. Keterbukaan harus diartikan sebagai sikap mawas diri, mengoreksi diri atau mengadakan introspeksi atas pola pikir yang sifatnya harus bersifat pola pikir yang komprehensif dengan pandangan jauh ke depan.

Dari hal ini akan dapat terlaksana apabila semua pihak dalam masyarakat ada kemauan baik dan kemampuan untuk *mengakui dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing sebagai warga negara yang baik*. Ada sebagian tanpa sadar mengartikan keterbukaan sebagai menelanjangi diri dengan berkedok atau berlingkungan pada hak-hak kebebasan bersuara, lalu berbicara keras seperti mencari popularitas murahan tanpa ia sadari bahwa dia sudah lepas kendali. Sedangkan dimana pun di dunia ini tidak ada kebebasan tanpa batas. Ini berarti sudah tidak konsekuen dengan konsensus nasional dengan moral Pancasila dan UUD'45.

f. Perkembangan "Demokrasi Pancasila" hendaknya juga semakin menyadarkan kita kepada pentingnya peningkatan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang telah menjadi tekad bangsa yang telah dimantapkan dalam muqodimah UUD 1945, terutama pada alinea keempat

yang dalam pelaksanaannya melalui Trilogi Pembangunan yaitu (a) Pertumbuhan ekonomi semakin tinggi (b) Stabilitas nasional dan (c) Perataan pembangunan. Untuk itulah pembangunan jangka panjang kedua perlu semakin menekankan pada masalah-masalah yang menjadi kepentingan rakyat banyak (kepentingan umum) dan mempersempit jurang kesenjangan sosial yang ada. Menyempitkan kesenjangan sosial juga tidak berarti mematikan atau mengurangi peranan usaha-usaha ekonomi kuat, tetapi sekali lagi menyadarkan kaum ekonomi kuat untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa, termasuk membantu ekonomi lemah agar sama-sama bergerak agar harkat dan martabatnya semakin terangkat.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi globalisasi dunia yang kita tidak dapat menghindarinya, jangan diartikan bahwa ada keharusan merubah konsep dasar bangsa yang telah kita yakini ke-

benarannya seperti konsep Wawasan Nusantara dan tidak pula menghapus sistem nasional yang sedang kita terapkan. Yang penting baik konsep Wawasan Nusantara dengan Ketahanan Nasionalnya dan sistem yang sedang berjalan tidak berjalan secara kaku. Kecenderungan-kecenderungan dalam globalisasi dunia itu dapat kita ambil manfaatnya, saling melengkapi dan dianggap sebagai suatu proses penyempurnaan peradaban manusia, yang kita adaptasi dengan keyakinan kita akan kebenaran Pancasila dan UUD '45.

Bahan Bacaan

1. Bahan Penataran P4 oleh BP-7 Pusat tahun 1993.
2. UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional RI.
3. Wawasan Nusantara Indonesia Menghadapi Globalisasi Dunia oleh Pusat Kajian Kebudayaan Universitas Bung Hatta 1992.
4. Pokok-pokok Pendidikan Kewiraan oleh Drs. H.A Somad Zawawi, CV Matarani Group, Cetakan Pertama, tahun 1987.
5. Produk Lemhanas.